

KEMUNGKINAN MUNCULNYA PAHAM ISLAM RADIKAL DI “PONDOK PESANTREN”

Edi Susanto

Abstrak: Semaraknya tindakan kekerasan yang mengatasnamakan “agama” sebagai *tameng* dengan pelaku yang memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren, telah membangkitkan opini, yang secara *arbitrer* menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan sarang paham radikal. Makalah ini berusaha mendeskripsikan *geneologi* radikalisme di Indonesia dan berusaha melacak kemungkinan munculnya radikalisme Islam berbasis pondok pesantren. Pada akhirnya disimpulkan bahwa wacana tersebut bersifat polemis, politis dan terkesan *over generalization*. Namun demikian, sesuai dengan heterogenitas pondok pesantren, diakui ada pondok pesantren—terutama yang berbasis salafiyah-wahabiyah--yang memang memberikan kontribusi pada radikalisme.

Kata kunci: Pondok pesantren, radikalisme, salafiyah-wahabisme

Pendahuluan

Wacana gerakan radikalisme Islam sejak era Reformasi meng-aktual seiring dengan berkembangnya berbagai organisasi keagamaan yang berorientasi politis, seperti Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam (FPI), Komite Persiapan Penegakan Islam (KPPSI), Lasykar Jihad, Jamaah Islam Ahlusunah Waljamaah, Forum Ulama Ummat Islam Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).¹ Sebagian pengamat menyebut gerakan keagamaan tersebut dipengaruhi oleh literatur yang terkait dengan gerakan pemikiran salafiyah Ibn Taymiyah yang dalam perkembangannya melahirkan gerakan radikal dalam pemikiran

¹Ilustrasi tentang gerakan Islam radikal di Indonesia pada era Reformasi ini periksa Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: PPIM, 2004).

dan aksi. Meskipun metode yang digunakan satu sama lain berbeda, tetapi misi yang diemban relatif sama, yakni ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Sebagian mereka dapat dipandang radikal dalam pemikiran dan damai dalam aksi-aksinya, sedangkan yang lainnya dinilai radikal dalam pemikiran dan juga radikal dalam aksi-aksinya.

Definisi dan Karakteristik Radikalisme Keagamaan

Radikalisme atau fundamentalisme² keberagamaan didefinisikan sebagai implementasi faham dan nilai ajaran agama dengan cara yang radikal,³ keras, fanatik, dan ekstrim. Dalam pengertian ini maka makna

²Istilah *radikalisme* oleh sebagian orang juga sering disamakan dengan faham fundamentalisme, yakni suatu faham yang pada mulanya lebih dilekatkan pada sebuah gerakan teologi dalam Agama Kristen di Barat, yang nampak menguat pada perempat abad 20. Inti faham kelompok fundamentalisme ini adalah bahwa semua yang tertulis dalam kitab Bible itu benar dan tidak pernah salah, dan wajib dipahami secara tekstual, literer, apa adanya dan tidak perlu ditafsirkan. Dalam perkembangan lebih lanjut--terutama karena adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, faham fundamentalisme agama ini kemudian berkembang kearah nuansa yang lebih politis (menjadi fundamentalisme politik), terutama ketika para penganut agama Kristen berkepentingan untuk memperjuangkan posisi mereka pada sektor publik, seperti penolakannya terhadap teori Darwin dan teori evolusi kejadian alam yang dikembangka dalam dunia pendidikan. Periksa Lionel Caplan, *Studies in Religious Fundamentalism* (Albany: State University of New York Press, 1987). Di antara intelektual yang menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian dengan maksud yang sama antara lain Azyumardi Azra. Periksa Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.108-110. Sementara banyak juga orientalis tidak sepakat dengan penggunaan istilah fundamentalisme terhadap fenomena radikalisme Islam, bahkan penggunaannya dinilai problematis karena istilah tersebut (fundamentalisme) sangat problematis. Periksa William E. Shepard, "Islam and Ideology: Toward a Typology" dalam Syafiq A. Mughni, ed. *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History* (Montreal: McGill-CIDA, t.t.), hlm. 416-419.

³Perkataan radikal berasal dari bahasa Latin "*radix*" yang artinya akar, dan dalam bahasa Inggris kata *radical* dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktek penganut paham radikal atau paham ekstrim.

Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren

radikalisme keberagamaan tidak selalu ditandai dengan aksi kekerasan yang bersifat anarkhis atau teroris.⁴

Dalam perspektif ilmu sosial, istilah radikalisme memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan sikap ketidakpuasan seseorang atau kelompok terhadap keberadaan *status quo* dan tuntutan terhadap sesuatu yang telah mapan untuk melakukan perubahan secara mendasar terhadap persoalan tertentu. Pada awalnya istilah radikal sering dikaitkan dengan gerakan sosial yang bersifat ekstrim kiri (komunis-sosialis), tetapi dalam perkembangan selanjutnya istilah tersebut juga dilekatkan dengan sebutan gerakan ekstrim kanan (misalnya *Fascisme* dan *Nazisme*).

Dalam konteks Islam, istilah radikalisme atau fundamentalisme Islam dipopulerkan pasca revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yakni untuk menyebut kelompok-kelompok muslim radikal yang ada di Timur Tengah. Atas dasar itu, konsep radikalisme berkembang menjadi konsep radikalisme global.⁵

⁴Dalam realita memang dapat ditemui bahwa sebagian kelompok gerakan radikal keagamaan hanya terbatas pada pemikiran dan ideologi saja, dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melaksanakan faham ajarannya, tetapi kelompok radikal lainnya menghalalkan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan faham keagamaannya. Atas dasar itu, dilihat dari sudut tipologi gerakan sosial, gerakan radikalisme keberagamaan, sebagaimana dikutip oleh Antony Giddens, dapat dikategorikan sebagai *transformative movements* (gerakan yang bersifat merubah secara total), yakni gerakan keagamaan yang ingin merubah tatanan sosial secara radikal. Pada umumnya gerakan keagamaan radikal masuk dalam tipologi ini, terutama karena gerakan keagamaan tersebut ingin merubah tatanan atau sistem sosial yang sedang berlaku, dan berkeinginan untuk mengganti dengan tatanan sosial yang sesuai dengan ideologi gerakan radikal tersebut. Sedangkan gerakan-gerakan keagamaan yang umum, dapat masuk dalam tipologi gerakan sosial lain, seperti *redemptive movements* (gerakan yang bersifat penyelamatan), *reformative movements* (gerakan yang bersifat pembaharuan) dan *alternative movements* (gerakan yang bersifat merubah secara parsial). Periksa Antony Giddens, *Sociology* (Cambridge: Polity Press, 1989), hlm.625.

⁵Istilah radikalisme atau fundamentalisme Islam sendiri sesungguhnya merupakan istilah yang bersifat polemis. Dalam konteks ini Azyumardi Azra menjelaskan bahwa Radikalisme/fundamentalisme Islam dapat dikatakan merupakan bentuk ekstrem dari gejala “revivalisme”. Jika revivalisme merupakan intensifikasi keislaman yang lebih berorientasi ke dalam (*inward oriented*) dan karenanya bersifat individual, maka fundamentalisme merupakan intensifikasi keislaman yang juga diarahkan keluar

Sebagai sebuah konsep yang bersifat global, radikalisme keagamaan memiliki karakteristik:⁶ [1] cenderung menafsirkan teks-teks kitab suci secara *rigid* (kaku) dan literalis (tekstual); [2] cenderung memonopoli kebenaran atas tafsir kitab suci/agama, dan bahkan menganggap dirinya sebagai pemegang otoritas dalam penafsiran agama yang paling absah, sehingga menganggap penafsir kitab orang atau kelompok lain yang tidak sealiran adalah sesat dan halal untuk dimusuhi. [3] memiliki pandangan yang apriori terhadap ideologi dan budaya Barat. Dalam kaitan ini dunia Barat dipandang sebagai musuh bebuyutan, imperialis yang selalu mengancam akidah dan eksistensi umat Islam; [4] menyatakan perang terhadap paham dan tindakan sekular; dan [5] cenderung dan tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya, khususnya dalam berhadapan dengan modernitas dan sekularitas yang dinilainya menyimpang dan merusak keimanan.⁷

(*outward oriented*), di samping juga ke dalam. Periksa Azra, *Pergolakan Politik*, hlm.107-108; idem, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999), hlm. 46-47. Sedangkan padanan istilah ini dalam konteks bahasa Arab *harakah al-Islâmiyah, muta'asysyibîn* (kelompok fanatik) atau *mutatharrifîn* (kelompok ekstrim/radikalis). Periksa R. Hrair Dekmejian, *Islam and Revolution: Fundamentalism in The Arab World* (Syracus: Syracus University press, 1985), hlm.4.

⁶Bahasan tentang karakteristik gerakan radikalisme keagamaan dapat dibaca pada Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm.2-9; Dekmejian, *Islam and Revolution*, hlm.4-8; Yusril Ihza Mahendra, "Fundamentalisme, Faktor dan Masa Depan", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, ed. *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.100-108.

⁷Di kalangan Islam, memang tidak semua kaum fundamentalis membolehkan atau menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya, sebagaimana pendapat Muhammad Sa'id al-Ashmawiy--yang dikutip Imam Thalkhah--membedakan antara "*activis political fundamentalism*" dan "*rationalist spiritualist fundamentalist*". Istilah pertama merujuk pada sekelompok muslim yang memperjuangkan Islam sebagai kekuatan politik. Sedangkan istilah berikutnya merujuk pada sekelompok muslim yang menginginkan kembali pada ajaran al-Qur'an dan al-Hadits sebagaimana dipraktikkan generasi pertama (*al-Salaf al-Shâlih*). Dalam sejarah Islam, kelompok pertama sebagaimana diperlihatkan kaum Khawarij dan yang kedua sebagaimana yang diperlihatkan Gerakan *Salafiyah* Ibn Taymiyah. Lihat Imam Thalkhah dan Neng Dara A., *Gerakan Keislaman Pasca orde Baru: Upaya*

Dengan melihat karakteristik tersebut, maka *image* radikalisme bagi masyarakat dan penguasa umumnya bersifat negatif *pejorative* meski dalam perkembangannya gerakan radikal dapat berubah menjadi positif, terutama apabila dalam skala tertentu perubahan yang diinginkannya dapat terwujud. Dengan *image* itu, gerakan radikalisme - apapun dasar ideologinya—bagi penguasa kurang diterima sepenuh hati.⁸

Radikalisme; Antara Reaksi Permanen atau Spontan

Eksistensi gerakan radikal, bukanlah monopoli dari kelompok agama atau suku tertentu. Gerakan radikalisme dapat saja muncul kapan saja dari semua kelompok agama, suku, ras dan ideologi serta kelompok politik manapun. Hal ini karena gerakan yang bersifat radikal, keras dan ekstrim sudah menjadi salah satu instrumen atau metode kelompok gerakan sosial maupun politik untuk mencapai tujuan atau

Merambah Dimensi Baru Islam (Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2005), hlm. 63-102.

⁸Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara gerakan radikalisme memang nampak cukup merepotkan para penguasa, terutama karena beberapa alasan: [1] gerakan radikalisme sering dinilai sebagai gerakan yang berkepentingan untuk membangun dan mewarnai dasar ideologi negara dengan paham ideologinya secara murni, atau mengganti ideologi negara yang sudah mapan dengan ideologi kelompok gerakan radikal tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain yang berbeda dengannya. [2] gerakan tersebut dianggap membawa instabilitas sosial, keresahan sosial, terutama karena sifatnya yang militan, keras, tegas, hitam putih, tidak mudah menyerah dan tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang cenderung anarkhis, merusak, di samping gerakan tersebut cenderung tidak mau kompromi serta tidak toleran terhadap kepentingan kelompok lain. [3] dampaknya, secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam eksistensi kedudukan para elit penguasa, terutama karena pengaruh agitasi ideologi dan provokasi gerakan radikal yang meluas dalam masyarakat dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap rezim penguasa tersebut, yang pada gilirannya dapat saja melahirkan pembangkangan dan revolusi sosial yang akan meruntuhkan singgasana rezim penguasa. Karena itu tidaklah mengherankan apabila siapapun rezim penguasa di sebuah negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk membatasi, mengeliminasi, menjinakkan, meredam atau menangkal berkembangnya gerakan radikalisme itu.

kepentingan tertentu, baik kepentingan yang bersifat individu atau kepentingan kelompok.⁹

Dalam konteks ini, karakter gerakan radikalisme kelompok-kelompok di Indonesia nampaknya sangat bervariasi, yang secara sederhana dapat dikategorisasikan secara dikhotomik yakni *radikal permanen*¹⁰ dan *radikal sementara*¹¹. Dalam perspektif ini, bangkitnya beberapa gerakan radikalisme kelompok-kelompok Islam, di beberapa daerah yang secara aktif melakukan protes, demonstrasi dan kekerasan anti perjudian, pelacuran dan pornografi dan mereka yang terlibat dalam konflik-konflik yang bernuansa keagamaan di berbagai daerah dewasa

⁹Dalam kasus Indonesia, misalnya, suasana ketika menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden pertama di era reformasi. Pada saat itu bermunculan kelompok-kelompok sosial pendukung partai politik yang melakukan gerakan-gerakan yang bersifat radikal, yang menonjolkan perilaku kekerasan, ekstrim dan intimidatif. Bahkan sebagian kelompok masyarakat yang tergabung atau simpatisan sebuah organisasi yang sejak lama dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang santun dan akomodatif, tiba-tiba dapat berubah menjadi kelompok gerakan yang radikal, keras, beringas, berani mati dan intimidatif terhadap individu atau kelompok lain. Tentu saja watak radikal semacam itu muncul karena instrumen untuk membela kepentingan politik kelompoknya dinilai sudah tidak efektif lagi, dan perilaku kekerasan menjadi alternatif bagi kelompok-kelompok sosial yang menderita frustrasi sosial. Dengan kata lain sebab-sebab lahirnya radikalisme itu karena adanya kesadaran bahwa kelangsungan hidup kelompok itu tertindas, termarginal, dan terancam kepentingan kelompoknya yang sudah mapan.

¹⁰Radikal permanen dimaksudkan sebagai gambaran terhadap kelompok masyarakat yang memang dikenal berkarakter radikal sepanjang sejarah, yang dalam pengertian umum dikenal sebagai kelompok *ekstrim kiri* atau *ekstrim kanan*. Kelompok ekstrim kiri sering diidentikkan dengan kelompok-kelompok yang bernuansa *marxisme*, yakni masyarakat yang memiliki ideologi dengan paradigma faham *marxis*, dengan tema sentral membela kaum proletar, kaum lemah, kaum tertindas dan berjuang atas nama rakyat kecil. Sedangkan kelompok *ekstrim kanan* sering diidentikkan kepada kelompok-kelompok yang bernuansa fundamentalis, yakni masyarakat yang memiliki ideologi dengan paradigma agama dan moral yang kuat, dengan tema sentral membela berlakunya hukum-hukum agama, berjuang atas nama Tuhan, membasmi tindakan maksiat dan tindakan amoral.

¹¹Radikal sementara dimaksudkan sebagai penyederhanaan terhadap kelompok masyarakat yang berkarakter radikal yang muncul sebagai reaksi sosial yang bersifat spontan dan situasional. Kelompok-kelompok sosial yang melakukan gerakan *radikal sementara* ini berkembang karena adanya situasi sosial yang memang kondusif membangkitkan gerakan kekerasan, sebagaimana kelompok-kelompok radikal yang muncul menjelang dan sesudah pemilihan umum.

ini, dapat dipandang masih dalam bingkai *gerakan radikal sementara* dan bersifat situasional. Gerakan mereka muncul ke permukaan karena situasi sosial budaya, ekonomi, politik yang masih krisis dan keamanan yang belum stabil serta penegakan hukum yang belum sepenuhnya berjalan, sehingga menjadikan suasana tersebut sangat kondusif untuk bangkitnya gerakan radikal semacam itu.

Akar Gerakan Radikalisme Islam

Lahirnya gerakan radikalisme keberagamaan (Islam) di Indonesia, memiliki hubungan erat dengan perkembangan gerakan pemikiran Salafiyah¹² di Timur Tengah. Selanjutnya, pada abad 12 Hijriah,

¹²Gerakan Salafiyah merupakan gerakan pemikiran yang berusaha menghidupkan kembali atau memurnikan ajaran Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah diamalkan oleh para ulama salaf (terdahulu). Tujuan dari gerakan pemikiran Islam salafiyah adalah agar umat Islam kembali kepada dua sumber utama pemikiran Islam, yakni kitab suci al-Qur'an dan kehidupan Nabi Muhammad SAW (Sunnah Rasul), serta meninggalkan pendapat ulama mazhab yang tidak berdasar pada dua sumber ajaran tersebut. Selain itu gerakan pemikiran Islam Salafiyah juga bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan kepercayaan-kepercayaan lama yang menyesatkan dan dari ajaran--ajaran tasawuf yang telah mengkultuskan tokoh agama termasuk kegiatan--kegiatan seperti memuja kuburan para wali atau tokoh agama tertentu. Tokoh gerakan ini adalah Taqiy al-Din Abu 'Abbās Ahmad ibn 'Abd al-Salām ibn Taymiyah, atau lebih dikenal **Ibn Taymiyah** (1263-1328) Melalui tulisan-tulisannya aliran ini mampu membangun dan menggerakkan alam pemikiran umat Islam kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama salaf. Gerakan pemikiran Islam Salafiyah juga biasa disebut dengan gerakan *tajdid* (pembaharuan), gerakan *islâh* (perbaikan), dan gerakan reformasi. Di antara doktrin awal dari gerakan Salafiyah ini adalah adanya pandangan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka sepanjang masa. Meskipun demikian diperlukan kehati-hatian dalam berfatwa. Selain itu, taklid buta diharamkan dan perdebatan teologis agar dihindarkan. Aliran ini mengkritik penggunaan logika dalam memahami teologi Islam dan menganjurkan kepada metodologi yang digunakan oleh ulama Salaf, yakni para sahabat dan tabiin. Konsekuensinya pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran yang cenderung harfiah, terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadits. Di antara sebab terwujudnya gerakan Salafiyah di Timur Tengah adalah: [1] krisis ijtihad. Sejak akhir abad ke 4 H, umat Islam mengalami stagnasi pemikiran, dan dalam beberapa hal justru dinilai mengalami kemunduran. Setelah munculnya ulama-ulama besar terutama dalam bidang fiqh dan Hadits seperti Abû Hanifah, Mâlik ibn Anas, Muhammad ibn Idris al-Syâfi'i, Bukhâri, Muslim dan *Muhaddits* lainnya, di kalangan

pemikiran Salafiyah ini dikembangkukuhkan oleh gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (Nejd, 1703-1787). Tujuan dari gerakan Wahabi ini juga ingin memurnikan ajaran Islam serta mengajak kembali kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang diamalkan oleh generasi awal umat Islam.¹³ Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan Salafiyah tidak

umat Islam tidak lagi berkembang para mujtahid yang mampu mengembangkan ijtihad yang melahirkan pemikiran orisinal melebihi para ulama besar madzhab di atas. Kalaupun ada ulama-ulama besar yang terkenal, mereka adalah para mujtahid yang masih berada dalam bingkai sebagai ulama pendukung madzhab sebelumnya. Pada masa ini pintu ijtihad telah dinyatakan tertutup, karena pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh madzhab telah di anggap lengkap, dan dipandang mampu menjawab berbagai persoalan. Karena itu, masyarakat Islam sejak waktu itu cenderung menjadi masyarakat yang statis, meniru saja atau taqlid. Akibatnya umat Islam mengalami stagnasi dalam berbagai bidang, baik bidang pemikiran keagamaan, politik, sosial, budaya, ekonomi maupun moral. [2] krisis kepemimpinan dalam tubuh umat. Setelah Bagdad jatuh ke tangan pasukan Mongol, kepemimpinan umat Islam seolah tidak menentu, terutama karena adanya pertentangan politik yang terus menerus antar para pemimpin Islam. Kondisi ini mengakibatkan kepemimpinan umat Islam menjadi lemah, tidak mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi para ulama dan cendekiawan, yang pada gilirannya pemikiran pembaharuan Islam tidak dapat berkembang secara maksimal. [3] berkembangnya aktivitas yang berorientasi takhayul dan khurafat, seperti memuja kuburan Nabi, ulama, tokoh tarekat, sufi, para wali yang telah meninggal dalam rangka mengharapkan berkah, mukjizat, perbaikan hidup yang tidak alami. Kegiatan ini dinilai telah mendorong umat Islam menjauhi inovasi dan kemajuan duniawi, yang dibutuhkan dalam membangun teknologi dan ekonomi umat Islam yang kuat.

¹³Yakni amalan Islam yang tidak bercampur dengan bid'ah, khurafat dan takhayul. Pemujaan terhadap kuburan para wali atau tokoh agama sebagaimana dilakukan oleh penganut tarekat juga di kecam oleh gerakan Wahabi. Di samping itu, gerakan Wahabi juga melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik dan sosial, termasuk melakukan penentangan terhadap penguasa yang tidak sah. Oleh karena itu gerakan pemikiran Salafiyah atau gerakan pemikiran keagamaan yang ingin memurnikan ajaran Islam sesuai dengan generasi awal (kaum salaf) setelah era generasi 'Abd al-Wahhâb, apapun nama kelompok atau organisasinya, biasanya juga disebut sebagai gerakan kelompok Wahabi. Dalam perkembangan lebih lanjut, tema sentral gerakan pemikiran Salafiyah ataupun Wahabi, seperti istilah memurnikan ajaran Islam, dan kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW telah menjadi ideologi dan memiliki daya tarik kuat terhadap umat Islam.

hanya menyentuh dimensi purifikasi *credo* dan ritual, namun juga mulai menyentuh dimensi intelektual dan politik.¹⁴

Masuknya Gerakan Pemikiran Salafiyah di Indonesia

Di Indonesia ide-ide gerakan pemikiran salafiyah sudah berkembang sejak era kolonial Belanda. Salah satu gerakan pemikiran Salafiyah awal di Indonesia adalah di Minangkabau.¹⁵ Gerakan ini

¹⁴Pertumbuhan gerakan Salafiyah diberbagai Negara juga dapat dipandang sebagai *antitesa* atau respon sebagian umat Islam terhadap perkembangan dunia yang dinilai semakin tidak bersahabat bagi kepentingan kehidupan umat. Perkembangan modernisasi dan kolonialisasi dalam segala bentuknya, serta pemikiran sekularisasi dari dunia Barat, di samping sebagai faktor pendorong munculnya gerakan pemikiran Salafiyah, ia juga menjadi faktor penting yang mendiversifikasi varian gerakan pemikiran ini. Kalau pemikiran Salafiyah era awal lebih berorientasi murni pada gerakan pemikiran keagamaan, maka pemikiran Salafiyah era kontemporer telah berkembang menjadi gerakan sosial, budaya dan politik. Perkembangan tersebut terlihat mulai akhir abad ke 19, yakni gerakan pemikiran Salafiyah selain tetap bertujuan melakukan pemurnian ajaran Islam, mereka juga melakukan gerakan moral, budaya dan politik. Di samping menyadarkan dan membangkitkan semangat dunia Islam untuk mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi moderen, terutama agar umat Islam tidak tertinggal dari dunia Barat. Mereka juga menyadarkan umat Islam agar menentang berbagai bentuk neo-kolonialisme, neo-imperialisme dan hegemoni dari dunia Barat yang membelenggu umat Islam. Dalam melaksanakan aktivitasnya, gerakan pemikiran Salafiyah ini tidak selalu sama, tergantung pada situasi dan kondisi politik yang berkembang. Pada masa sebelum perang dunia, gerakan pemikiran Salafiyah yang bersifat politis cenderung dilakukan secara *clandestine*, rahasia, tidak muncul di permukaan, dan lebih menekankan pada pengembangan lembaga pendidikan dan dakwah keagamaan yang bersifat internal, terutama karena mereka khawatir dimusuhi oleh pemerintah kolonial. Namun setelah perang dunia I, kelompok-kelompok gerakan pemikiran Salafiyah di berbagai negara yang bersifat politis muncul ke permukaan dan ikut dalam perdebatan-perdebatan dan kompetisi membangun organisasi sosial maupun partai politik. Misalnya di Tunesia dengan partai Tunesia Muda (1907), Maroko dengan partai nasional al Istiqlal (1960 an), Mesir dengan Ikhwanul Muslimin (1928) dan di Al Jazair dengan partai Front Keselamatan Islam (1989).

¹⁵Gerakan ini dipelopori oleh orang Paderi, Tuanku Nan Tuo dari Nagari Koto Tuo, Ampek Angkek Canduang (1784-1803), yang dalam perjalanannya melahirkan perang Paderi. Orang-orang Minangkabau, sebelum hadirnya gerakan Paderi masih mencampurkan praktek ajaran Islam dengan kepercayaan adat lokal, takhayul, khurafat dan bid'ah. Selain itu orang-orang Minangkabau waktu itu juga hobi sabung ayam, minum tuak dan berjudi. Gerakan Paderi ini pada masa awalnya masih

mengalami perkembangan seirama dengan munculnya tokoh-tokoh gerakan pemikiran Salafiyah di Timur Tengah,¹⁶ yang ide dan gagasannya diserap oleh orang Indonesia yang melakukan haji dan kemudian bermukim untuk belajar agama Islam. Setelah pulang, mereka secara individu atau melalui organisasi melakukan gerakan pembaharuan Islam sesuai dengan aliran Salafiyah.¹⁷

nampak lunak dan moderat, dengan cara dakwah lisan, menyerukan atau mengajak orang-orang Minangkabau untuk beribadah yang benar, sesuai dengan ajaran Islam, serta menyerukan agar adat kebiasaan sabung ayam, judi dan minum *tuak* di tinggalkan. Gerakan Paderi menjadi radikal dan keras setelah datang 3 tokoh agama yang baru pulang dari Makkah (1803) yakni Haji Miskin, Haji Piobang dan Haji Sumanik. Radikalisme gerakan Paderi ini dimulai dengan pembakaran Balai Adat di Pantai Sikek, terutama karena gerakan Paderi merasa tidak mampu lagi melihat perkembangan judi, sabung ayam dan minum tuak merajalela di tempat-tempat terbuka. Menurut pandangan gerakan Paderi yang radikal ini, jihad fisik dapat dipakai terhadap orang-orang yang tidak dapat lagi diperingatkan dengan damai. Bahkan Tuanku Nan Renceh, tokoh pendukung gerakan Paderi ini membunuh saudara perempuan ibunya yang masih menggunakan tembakau, karena penggunaan tembakau menurutnya dilarang dalam Islam. Sumber kepustakaan menjelaskan bahwa gerakan Paderi ini dipengaruhi oleh gerakan keagamaan Wahabi (1703-1792) yang waktu itu memang cukup berpengaruh terhadap para haji yang belajar di Mekkah. Bahasan tentang ini periksa Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 368-372.

¹⁶Seperti Syaikh Jamâl al-Dîn al-Afghânî (1839-1897), Muhammad 'Abduh (1849-1905), dan Rasyîd Ridlâ (1865-1935), yang melakukan gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Mesir. Para tokoh pembaharuan pemikiran di Mesir ini, di samping mengajak umat Islam kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana gerakan pemikiran Wahabi, mereka juga mengajak umat Islam agar meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen untuk mencapai kemajuan, menghilangkan kebodohan dan mengatasi keterbelakangan.

¹⁷Misalnya Syaikh Ahmad Khâtib al-Minangkabawiy (1855-1916), yang bermukim di Mekkah dan memiliki banyak murid dari Indonesia, yang kemudian menyebarkan pemikiran pembaharuan Islam di Minangkabau dan Jawa. Selain itu, terbitnya majalah *al-Imâm* di Singapura dan *al-Munîr* di Minangkabau, yang membawa misi pembaharuan pemikiran Islam cukup berpengaruh terhadap perkembangan gerakan pemikiran Salafiyah di Indonesia. Periksa Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982). Demikian juga hadirnya organisasi Jâmi'ât Khair yang diprakarsai warga masyarakat Arab Hadrami di Indonesia, yang kemudian melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan ikut pula berpengaruh terhadap perkembangan gerakan keagamaan di Indonesia. Bahasan tentang kiprah

Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren

Pada masanya, kehadiran gerakan Salafiyah banyak menimbulkan pertentangan. Di mana-mana--termasuk di Indonesia--gerakan Salafiyah banyak berbenturan dengan kelompok Islam tradisional.¹⁸ Demikian juga pada pra dan awal kemerdekaan Indonesia, benih radikalisme keberagamaan yang berkembang melalui lembaga-lembaga pendidikan

Arab Hadrami, melalui organisasi al-Irsyad, periksa Natalie Mobini Keshesh, *The Hadrami Awakening, Community and Identity in The NetherlandsEast Indie 1900-1942* (Ithaca: Cornell University, 1999). Lebih lanjut, gerakan pemikiran yang bernuansa Salafiyah yang cukup berpengaruh di Indonesia kemudian adalah Muhammadiyah (1912), Sarikat Islam (1912), Al Irsyad (1914), Jong Islamiten Bond (1925-1942), Persatuan Islam (1923), dan Partai Islam Indonesia (1938). Gerakan pemikiran organisasi tersebut pada masa awalnya juga termasuk dalam kategori radikalisme, terutama karena ingin melakukan perubahan yang mendasar terhadap tradisi keberagamaan masyarakat, namun pada umumnya mereka lebih terkesan pada pola gerakan radikal dalam pemikiran dan bukan radikal dalam tindakan fisik. Radikalisasi yang dilakukan oleh para tokoh gerakan keagamaan tersebut adalah mengajak umat Islam meninggalkan praktek keagamaan yang bernuansa bid'ah, khurafat, taklid, dan mendorong umat Islam melakukan ijtihad, dengan cara-cara yang non kekerasan. Sebagian dari upaya mereka memperjuangkan perubahan umat Islam adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern, panti asuhan, dan klinik kesehatan. Sebagian mereka bergerak di bidang politik melawan penjajah.

¹⁸Di Minangkabau misalnya, gerakan ini telah melahirkan pertentangan antara kaum tua dan kaum muda. Kaum tua mempertahankan pemahaman agama sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan, sedangkan kaum muda terus mengembangkan pembaharuan pemikiran secara radikal. Penganut Muhammadiyah dan Persis yang terus menerus melakukan gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang bersifat radikal pada masa awal mendapat tantangan dari umat Islam tradisional. Gerakan pengikut kaum Wahabi, yang telah menghancurkan kubah dan hiasan di atas kuburan para Syaikh, dan makam Nabi SAW, termasuk kiswah sutra yang menutupi Ka'bah, mendapat tantangan dari umat Islam tradisional. Karena itu ketika kaum Wahabi menguasai Makkah dan Madinah tahun 1804 dan 1806, direbut kembali oleh Khedewi Muhammad Ali pada tahun 1813 atas perintah Sultan Mahmud II dari Kerajaan Usmani. Namun gerakan Wahabi menguasai kembali Mekah (1924) dan Madinah serta Jedah pada tahun 1925 atas dukungan Ibnu Sa'ud, dan kemudian melakukan penghancuran kembali tempat-tempat yang dinilai keramat di sekitar Makkah. Dukungan pemerintah Saudi Arabia terhadap gerakan Wahabi dan dengan pemikiran Salafiyah semacam itu telah membuat kelompok Islam tradisional khawatir akan terancamnya eksistensi pemikiran empat madhab di Makkah dan kelestarian tempat-tempat yang mengandung nilai sejarah Islam yang berharga. Kekhawatiran ini di Indonesia pada gilirannya mendorong dibentuknya organisasi Nahdatul Ulama pada tahun 1926, yang di antara fungsi latennya adalah mempertahankan tradisi praktek keislaman yang sudah berjalan lama, termasuk tradisi gerakan berbagai tarekat di Indonesia.

dan dakwah serta sebagian yang lain berkembang melalui organisasi sosial dan politik, juga menimbulkan pertentangan pemerintah.¹⁹

Pada masa Orde Baru pun demikian, namun penanganan dan kontrol pemerintah terhadap gerakan radikalisme keberagamaan berlangsung secara ketat, dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat kooptatif seperti *pendekatan militeristis*, *terror mental* maupun pendekatan yang bersifat kooperatif seperti *pendekatan dialogis*, *pendekatan kesejahteraan* dan *pendekatan demokratisasi*.

Namun demikian--meskipun telah diusahakan dengan beragam penanganan--radikalisme keberagamaan tetap hidup pada sebagian masyarakat Islam, meskipun jumlahnya relatif kecil dan bersifat sporadis.²⁰ Dalam konteks ini, relevan untuk diajukan pertanyaan mengapa fenomena tersebut tetap eksis? Sehubungan dengan ini, Roy A. Rappaport menyatakan bahwa secara sosiologis antropologis, tendensi orang untuk kembali ke agama meningkat ketika ia berada dalam kondisi krisis. Pada sisi lain, pendekatan skriptural ini mudah diikuti terutama bagi mereka yang tengah mengalami *new convert* atau *born*

¹⁹Radikalisme keberagamaan yang berkembang melalui jalur gerakan sosial dan politik terefleksi dalam perjuangan kelompok atau organisasi sosial politik yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, atau mereka yang memperjuangkan Piagam Jakarta sebagai bagian integral konstitusi negara. Dalam perkembangan lebih lanjut radikalisme keberagamaan juga tercermin dalam diri partai Islam Masyumi yang secara tegas menghendaki Islam sebagai dasar negara. Setelah Masyumi di bubarkan oleh pemerintah Orde Lama, radikalisme keberagamaan tidaklah lenyap. Gerakan radikalisme keberagamaan muncul dalam bentuk gerakan-gerakan politik di luar sistem pemerintahan, seperti Dâr al-Islâm (DI), dan Negara Islam Indonesia (NII) yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Radikalisme keberagamaan kelompok ini tidak saja dalam pemikiran, tetapi juga dalam bentuk-bentuk aksi pemberontakan dengan senjata melawan pemerintah. Pada akhirnya pemerintah memang dapat meredam aksi-aksi kekerasan kelompok radikal ini, namun dalam tataran ideologis dan pemikiran, gerakan tersebut tetap berkembang dengan pola gerakan yang sifatnya bawah tanah (*clandestine*). Bahasan tentang DI/TII lihat C. Van Dijk, *Rebellion under The Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia* (The Hague: Martinus Hijhoff, 1981). Buku ini telah diterjemahkan dengan judul *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafiti press, 1989).

²⁰Hal ini terlihat dengan munculnya gerakan-gerakan seperti Komando Jihad, gerakan radikal kelompok Islam pimpinan Imron, Warman, dan Amir Biki, di samping adanya fenomena pembakaran-pembakaran tempat ibadah.

Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren

again religious atau pun mereka yang *unfortunate people* (tidak beruntung, miskin).²¹

Kemungkinan Lahirnya Gerakan Islam Radikal di “Pondok Pesantren”.

Adanya kemungkinan munculnya radikalisme Islam komunitas “pondok pesantren”²² bukan suatu hal yang mustahil.²³ Namun demikian, penting dicatat bahwa tingkat kemungkinan munculnya gerakan

²¹Periksa Roy A. Rappaport, *Ritual and Religion in the Making of Humanity* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

²²Ngatawi al-Zastrow mentipologikan pesantren dalam kaitannya dengan arus modernisme pada 3 kategori. *Pertama*, pesantren yang menolak total modernisme. *Kedua*, pesantren yang menerima secara total pemikiran, model dan konsep modernisme. *Ketiga*, menerima modernisme secara selektif, dan-dalam pandangan Zastrow-inilah yang mayoritas. Di samping ketiga tipologi di atas, sejalan dengan meningkatnya intensitas interaksi sosial para tokoh dan pemimpin gerakan Islam, pada dekade 90-an muncul pesantren dengan tipe baru yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki jaringan dengan beberapa gerakan Islam internasional. Pesantren jenis ini bersifat *ahistoris* dan terbentuk tidak berdasarkan kohesivitas sosial masyarakat tempat berdirinya pesantren tersebut, tetapi lebih kepada jaringan yang dibangun oleh pendirinya. Periksa Ngatawi al-Zastrow, “Dialog Pesantren-Barat: Sebuah Transformasi Dunia Pesantren”, *Mihrab*, No. 1 Tahun IV-2006, hlm. 4. Pesantren tipe inilah, yang barangkali, mendidik santrinya ke arah militansi dalam penghayatan keagamaannya, meskipun--merupakan sikap arbitrer--jika diidentifikasi sebagai sarang teroris.

²³Wacana ini semakin menghangat seiring dengan gagasan wakil presiden Jusuf Kalla yang berkeinginan untuk mengambil sidik jari para santri pondok pesantren secara nasional. Pada sisi lain, wacana yang berkembang sejak runtuhnya gedung WTC di Amerika tanggal 11 September 2002, kemudian disusul adanya serangkaian teror dengan ledakan bom di Indonesia, seperti di Bali I dan II, Hotel JW Marriot, di depan Kedutaan Besar Australia, kemudian diikuti juga dengan pengejaran dan penangkapan para “*pelaku teroris*” yang sebagian dari mereka adalah dari alumni pesantren. Fakta itu memberikan kesan dan dugaan sebagian orang bahwa dunia pesantren kini telah melahirkan radikalisme kelompok Islam. Bahkan beberapa pesantren, seperti al-Mukmin Ngruki, Hidayatullah, Tenggulun dan juga Ma’had al-Zaitun Indramayu sebagaimana telah tersiar dalam berbagai media beberapa waktu yang lalu dicurigai sebagai persemaian kelompok Islam radikal. Kecurigaan tersebut didasarkan adanya berita-berita atau dugaan bahwa pesantren tersebut telah mengembangkan sistem pendidikan yang khas, memiliki *hidden curriculum* dengan ideologi keagamaan yang radikal. Di samping itu bahwa sebagian dari pesantren tersebut telah melahirkan para alumni yang diduga dan diadili terlibat dalam gerakan teror bom.

radikalisme Islam dari lingkungan pesantren tidak dapat dipukul rata (*arbitrer*), terutama karena dunia pesantren sangatlah heterogen.²⁴ Secara sederhana tingkat kemungkinan tersebut dapat dikategorikan dengan *kemungkinan tinggi* dan *kemungkinan rendah*. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kemungkinan tersebut tidak bisa dipukul rata, *pertama*, latar belakang pengetahuan agama dan faham keagamaan para pimpinan pesantren antar pesantren satu dengan yang lain berbeda-beda.²⁵ Dalam realita, kompetensi, keahlian, faham keagamaan dan orientasi amalan kyai satu dengan yang lain berbeda-beda. Sebagian kyai cenderung pada pengembangan gerakan pendidikan, pengembangan, kehidupan agama sejenis tasawuf, sufisme, akhlak atau tarekat yang menjauh dari hingar bingar kehidupan material, sebagian kyai cenderung pada gerakan pendidikan, dan pengembangan kehidupan agama yang bersifat sosial dan budaya, yang dekat dengan kehidupan material. Selain itu juga terdapat sebagian kyai yang cenderung pada gerakan pendidikan dan pengembangan kehidupan spiritual, dengan orientasi pemurnian dan proteksi bidang akidah. Kecenderungan yang terakhir ini dekat dengan gerakan pemikiran Salafiyah yang

²⁴Lagi pula karakter asli pondok pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan, sangat menekan dimensi skolastisitas yang sangat berpihak pada paham keagamaan Sunni yang sangat mengedepankan perilaku *i'tidâl, tasâmuh, tawâzun* dan *tawassuth* sekaligus pada saat yang sama sangat jauh dari paham keagamaan ekstrem. Mayoritas pesantren tradisional di Indonesia sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip ke-Sunni-an tersebut, kecuali beberapa pesantren yang memang memiliki kekhasan tertentu sebagai akibat persinggungan pengasuhnya dengan beberapa faktor eksternal. Dalam konteks ini, sebutan pesantren untuk lembaga pendidikan yang *ahistoris* dan tidak mencerminkan karakter dasar tradisi Sunni tersebut merupakan sesuatu yang salah kaprah. (lihat catatan kaki no. 22 di atas) Pondok pesantren, sesuai dengan namanya yang berasal dari kata *sastri* senantiasa mengedepankan sisi-sisi perilaku yang jauh dari ekstremitas dan radikalisme.

²⁵Yang dimaksud dengan pimpinan pesantren di sini adalah individu atau kelompok yang memiliki otoritas kebijakan dalam pesantren. Dalam tradisi pesantren, otoritas tertinggi pesantren dipegang oleh seorang kyai, namun dalam perkembangan sekarang tidak sedikit pimpinan pesantren dipegang secara kolektif, lebih dari seorang kyai, dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam perspektif kelekturan, fungsi kyai (baik sebagai individu atau kelompok) dapat dipandang sebagai lektur sepanjang hari, sebagai perpustakaan hidup, sumber bacaan, rujukan dan kamus hidup bagi para santri. Berbagai wawasan pengetahuan dan paham keagamaan akan sangat dipengaruhi oleh kyai tersebut.

Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren

memiliki kemungkinan tinggi untuk berkembang menjadi gerakan radikalisme kelompok Islam.

Kedua, sistem pendidikan, termasuk kualitas tenaga pengajar, bahan ajar, kurikulum tersembunyi²⁶ dan literatur pesantren antar satu dengan yang lain berbeda-beda. Dalam kaitan ini, tenaga pengajar (*ustâdz*) memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap santri. Hal ini karena dalam tradisi pesantren penghormatan terhadap guru termasuk bagian yang sangat penting. Pada sisi lain, guru di pesantren juga dapat dipandang sebagai lektur hidup, sumber bacaan dan tempat bertanya yang harus diikuti. Belajar di pesantren adalah belajar dengan guru secara bertahap, bukan dari kitab secara mandiri. Dalam konteks ini, guru memiliki wewenang memberikan *syarh*, tafsir atau pemaknaan terhadap kitab-kitab bahan ajar di pesantren. Belajar tanpa guru di dunia pesantren tidak direkomendasikan. Bahkan ada kalanya, kitab-kitab bahan ajar tertentu tidak diperkenankan untuk dibaca sebelum menguasai kitab-kitab bahan ajar tertentu. Karena itu fungsi lektur dalam pengertian bahan bacaan kitab-kitab bahan ajar atau buku-buku pelajaran dalam pesantren memiliki pengaruh kuat terhadap santri melalui guru.

²⁶Kurikulum tersembunyi ini maksudnya adalah proses belajar mengajar di luar yang formal. Dalam tradisi pesantren, bagian dari kurikulum tersembunyi ini jenisnya sangat banyak, terutama karena kehidupan pendidikan pesantren berlangsung sepanjang hari siang dan malam. seperti nasehat-nasehat, saran-saran atau peringatan dari kyai, ustadz kepada para santri dalam khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah yang sifatnya kolektif terbuka atau tertutup, serta nasehat-nasehat secara pribadi atau kolektif, baik langsung maupun tidak langsung antar santri, atau dari kyai dan guru kepada santri adalah bagian dari kurikulum tersembunyi. Demikian juga adanya bacaan melalui kepustakaan, dengan sejumlah kitab, buku, majalah dan jurnal yang bermacam-macam di pesantren juga bagian dari instrumen kurikulum tersembunyi. Para santri yang secara aktif membaca pengetahuan dari sumber perpustakaan juga akan dapat dipengaruhi oleh isi yang dibaca. Dalam kaitan ini pada pesantren-pesantren yang memiliki literatur atau bahan ajar dari kitab-kitab pemikiran salafi, tentu memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk memunculkan fundamentalisme, meskipun pengaruhnya relatif kecil dibanding dengan sumber bacaan hidup dari *ustâdz* atau kyai. Dalam lingkungan pesantren kadangkala juga ditemui bacaan-bacaan yang ditempel dalam ruangan belajar atau pintu-pintu kamar yang berbunyi: *Hidup mulia atau mati syahid, Katakan yang benar walaupun rasanya pahit*. Bacaan semacam itu tentu memiliki pengaruh tertentu kepada santri.

Ketiga, lingkungan sosial pesantren, termasuk jaringan sosial dan politik unsur pesantren (pimpinan, ustadz dan santri) berbeda-beda. Sebagian pesantren mungkin memiliki jaringan yang sangat luas, bersifat nasional dan bahkan internasional dan sebagian pesantren lain memiliki jaringan yang terbatas pada tingkat lokal. Sebagian pesantren mungkin memiliki jaringan sosial dengan para pimpinan birokrasi atau organisasi gerakan politik kebangsaan sebagian pesantren lain mungkin memiliki jaringan gerakan keagamaan yang bersifat internasional. Pesantren-pesantren yang memiliki jaringan dengan gerakan-gerakan perjuangan dan radikalisme kelompok Islam internasional tentu memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melahirkan fundamentalisme.

Keempat, pengalaman perjuangan kehidupan sosial dan politik pimpinan pesantren. Setiap pimpinan pesantren memiliki pengalaman kehidupan sosial, budaya dan politik yang berbeda-beda. Sebagian mereka memiliki pengalaman yang mungkin menyenangkan dan sebagian yang lain memiliki pengalaman pahit, yang menantang. Pengalaman masa lalu tersebut akan mempengaruhi orientasi dan visi pimpinan pesantren menjadi pendukung--dan penyokong--gerakan Islam radikal.

Akan tetapi juga penting digarisbawahi, bahwa kemungkinan munculnya radikalisme Islam pada pondok pesantren tidaklah semata-mata karena beberapa faktor di atas, tetapi masih banyak faktor eksternal lain yang ikut mempengaruhi, seperti faktor ideologi politik, dan sosial budaya, solidaritas kelompok, dan doktrin teologis.

Pertama, faktor perkembangan ideologi dan politik. Berubahnya sistem dan bandul politik dari Orde Baru²⁷ menuju era Reformasi yang

²⁷Pada masa Orde Baru, hegemoni ideologi dan politik Negara sedemikian dominan, sehingga dapat dipandang sebagai salah satu faktor signifikan dalam meredam gerakan radikalisme keagamaan--yang diidentifikasi sebagai ekstrem kanan--maupun radikalisme ideologi politik yang diidentifikasi sebagai ekstrem kiri. Dalam konteks ini, banyak pendapat menyatakan bahwa pada masa Orde Baru sistem politik dan ideologi memang dikembangkan dalam masyarakat, tetapi tujuannya lebih cenderung untuk kepentingan golongan elite. Asas negara dijadikan sebagai ideologi bangsa dan dipaksakan sebagai ideologi komunitas masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya UU No. 3/1985 yang menegaskan bahwa pencantuman asas Organisasi sosial politik selain Pancasila tidak dibenarkan, dan UU No. 8/1985 secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya asas organisasi kemasyarakatan di Indonesia adalah

lebih terbuka²⁸ memberikan peluang pada kelompok Islam yang sejak lama menginginkan berdirinya gerakan sosial politik yang bertujuan

Pancasila. Melalui pendekatan ini, stabilitas sosial dapat dibangun dan gerakan radikal dapat diredam. Tetapi nampaknya, stabilitas sosial yang diciptakan selama tiga dasawarsa tersebut merupakan stabilitas semu. Faktanya pada akhir tahun-tahun 1990-an, ketika negara sedang dilanda krisis ekonomi, dan para pengusaha besar penopang kekuatan negara ambruk, maka negara mengalami krisis sosial dan politik yang dahsyat. Adanya krisis ekonomi, sosial dan politik ini melahirkan arus gerakan sosial yang sangat radikal, tidak hanya radikal dalam pikiran dan wawasan, tetapi juga radikal dalam perilaku. Gerakan radikal ini berhasil melakukan reformasi negara, yang akhirnya mewujudkan apa yang disebut sebagai era reformasi.

²⁸Pada era reformasi ini, partai-partai politik dan organisasi sosial diberikan kebebasan untuk muncul dan berkembang. Demikian juga, sistem pemerintahan yang sentralistis diganti dengan sistem pemerintahan yang relatif otonom, meskipun dalam beberapa hal masih sentralistis. Kebebasan pers menjadi sangat tinggi, dan rakyat memiliki kebebasan untuk mengemukakan berbagai pendapat yang pada era sebelumnya sebagai hal yang tabu untuk diungkapkan. Kondisi ini memaksa Undang-Undang Dasar 1945 yang pada masa Orde Baru relatif dikeramatkan dan tabu untuk dikritisi, sekarang justru dituntut oleh berbagai kelompok masyarakat untuk di*amandemen*. Bahkan sebagian kelompok masyarakat Islam yang diwakili oleh organisasi keagamaan seperti Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin menuntut agar UUD 1945 diganti dengan UUD yang berdasar pada syariah Islam. Akhirnya, kedua Undang-Undang (UU No. 3/1985, dan UU No. 8/1985) dicabut, dan negara memberikan kebebasan kepada semua organisasi sosial maupun politik untuk menentukan asasnya masing-masing. Pengaruhnya jelas, organisasi-organisasi sosial dan politik bermunculan dengan asas sesuai dengan ideologinya masing-masing. Hal ini berarti sistem politik dan ideologi pada era reformasi telah memberikan peluang yang luas bagi tumbuhnya gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat militan dan radikal. Perkembangan ini memang sebagai bagian dari proses demokratisasi yang harus dilalui. Namun yang perlu dicermati lebih jauh adalah, apakah kelompok-kelompok radikal ini dalam mencapai tujuan ideologinya masih dalam kerangka sistem demokrasi bangsa Indonesia atau tidak. Selama kelompok radikal tersebut dalam melakukan aktivitasnya masih dalam kerangka sistem demokrasi yang disepakati bangsa Indonesia, maka kelompok radikal ini akan tetap berkembang. Lahirnya era reformasi yang kemudian membawa pada era otonomi daerah, juga telah memberikan ruang gerak yang relatif bebas dan luas terhadap bangkitnya gerakan radikalisme ke permukaan. Suasana demikian memang sangat memungkinkan karena kondisi sosial, ekonomi dan politis pada era reformasi ini hingga saat ini masih bersifat transisional, sebuah era yang sedang mencari bentuk sistem sosial yang tepat bagi Indonesia Baru. Bangkitnya gerakan-gerakan yang bersifat radikal yang cenderung terus berkembang di era ini, tentu saja akan sangat merepotkan penguasa yang sedang membenahi keterpurukan ekonomi dan politik kenegaraan, terutama karena benturan kepentingan

untuk menegakkan syariat Islam. Dalam pandangan mereka hanya *syari'at Islam* yang diyakini mampu menyelesaikan krisis multi dimensional dewasa ini. Di antara upaya yang dilakukan adalah berjuang melalui berbagai saluran, termasuk aksi-aksi politik yang bersifat langsung atau tak langsung untuk menegakkan Syariat Islam melalui formalisasi syariat Islam dalam lembaga negara.

Kedua, faktor sosial budaya. Seiring dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi peradaban dunia, di Indonesia telah berkembang pusat-pusat kegiatan di perkotaan yang dinilai oleh kelompok radikalisme keberagamaan sebagai maksiat dan sesat, seperti tempat-tempat prostitusi, judi, transaksi narkoba, minum minuman keras.²⁹ Sebagian dari para kelompok radikal tersebut tidak sabar lagi melihat perkembangan tempat-tempat maksiat tersebut, dan kemudian dengan terpaksa menggunakan cara-cara yang radikal, kekerasan, untuk melenyapkan tempat maksiat tersebut, meskipun mereka harus berhadapan dengan penegak hukum. Kelompok seperti FPI dekat dengan ciri ini.

Ketiga, faktor solidaritas dan pembelaan. Sebagian dari gerakan ini muncul sebagai reaksi atau pembelaan terhadap kelompok-kelompok Islam yang dipandang mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh kelompok-kelompok tertentu, dan tidak segera memperoleh perlindungan yang memadai oleh pemerintah. Bentuk-bentuk pembelaan yang dilakukan, tidak saja hanya terbatas pada dukungan moral melalui pernyataan-pernyataan, dan pemberian bantuan dana kepada para korban kekerasan, tetapi juga dalam bentuk pengiriman tenaga dan senjata untuk ikut bergabung berperang secara fisik dengan mereka yang dianggap sebagai musuh kelompok Islam tersebut. Kelompok seperti Lasykar Jihad dekat dengan ciri faktor ini.

Keempat, faktor doktrin teologis. Sebagian dari gerakan radikalisme beragama ini muncul sebagaimana gerakan-gerakan pemikiran Salafiyah sebelumnya, yakni ingin terus memurnikan ajaran Islam dari

antara gerakan-gerakan radikal satu sama lain dalam skala mikro di daerah otonom dapat merusak integrasi sosial dan dalam skala makro akan mengancam integrasi bangsa.

²⁹Dalam konteks ini, Oliver Roy dalam bukunya *The Failure of Political Islam* – sebagaimana dikutip Mun'im A. Sirry—menyatakan bahwa radikalisme sesungguhnya merupakan anak kandung--sekaligus reaksi--terhadap ekseseks negatif dari pada modernitas. Periksa Sirry, *membendung Militansi Agama*, hlm. 4.

berbagai pengaruh budaya, baik yang bersifat budaya lokal maupun budaya Barat yang dipandang telah merusak keyakinan dan kehidupan umat Islam. Personifikasi dari budaya Barat yang saat ini dipandang sebagai musuh Islam adalah hegemoni pemerintah Amerika Serikat.

Penutup

Dari pembahasan di atas, kiranya dapat ditegaskan bahwa munculnya radikalisme Islam pada "pondok pesantren", hingga batas tertentu, merupakan wacana yang bersifat polemis sekaligus politis sehingga kemungkinan dalam kemunculannya sangat terbuka untuk diperdebatkan. Perdebatan itu semakin signifikan, jika ditilik dari karakter dasar pondok pesantren yang berakar dan tumbuh berkembang dalam tradisi Nahdhatul Ulama (NU), dalam mana tradisi NU sangat kental dengan nuansa tradisi keagamaan yang mengedepankan sisi-sisi *i'tidâl*, *tasâmuh*, dan *tawâzun*. Meski demikian, mengingat realitas "pondok pesantren" bukan hanya berakar pada tradisi NU,³⁰ maka sudah barang tentu orientasi dan karakteristiknya sedemikian variatif dan heterogen..

Dalam konteks inilah, teori kemungkinan dapat dijadikan sebagai perspektif, yakni teori kemungkinan tinggi dan teori kemungkinan rendah. Bagi "pondok pesantren" yang para civitasnya, atas beberapa faktor tertentu--baik internal maupun eksternal--terbuka peluang besar untuk berpaham radikal, maka kemungkinan kontribusi pondok pesantren dalam mewujudkan radikalisme Islam menjadi besar. Namun sebaliknya, bagi pondok pesantren yang masih mempertahankan karakter dasar dan akar tradisi *pakem* pondok pesantren--sekaligus tidak memiliki jaringan eksternal--jelas kemungkinannya rendah.

Atas dasar itu, wacana bahwa pesantren--secara pukul rata--mencetak generasi berpaham radikal, merupakan wacana yang bersifat *arbitrer*, *over estimate*, *under generalization* dan terkesan sangat bersifat politis dan--karena itu--menyesatkan. *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb*.*

³⁰Muhammadiyah juga mengembangkan pondok pesantren, demikian juga Persis (Persatuan Islam), bahkan juga komunitas Syi'ah di Bangil juga mendirikan pondok pesantren dengan kurikulum yang sangat berbeda dengan kurikulum pesantren komunitas NU.